

**PERANAN KREDIT KELOMPOK PETANI KECIL  
DALAM PEMBINAAN USAHA SAMPINGAN  
DI KABUPATEN DELI SERDANG DAN LANGKAT**

**TESIS**



**Oleh :**

**RAHMANIAH  
NPM :081802014**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

-----  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/22

# **PERANAN KREDIT KELOMPOK PETANI KECIL DALAM PEMBINAAN USAHA SAMPINGAN DI KABUPATEN DELI SERDANG DAN LANGKAT**

## **TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen Agribisnis (MMA)  
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh :

**RAHMANIAH  
NPM :081802014**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)23/8/22

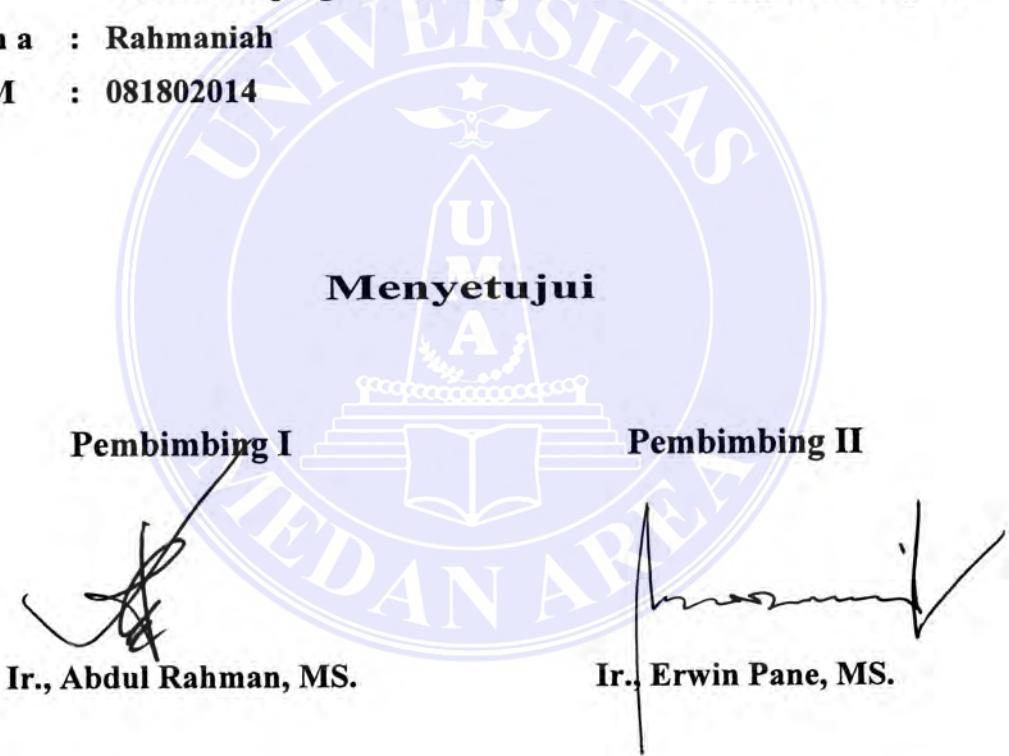
**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Peranan Kredit Kelompok Petani Kecil dalam Pembinaan  
Usaha Sampingan di Kabupaten Deli Serdang dan Langkat**

**N a m a : Rahmaniah**

**N P M : 081802014**



**Ketua Program Studi  
Magister Manajemen Agribisnis**

**Direktur**

**Dr., Ir., Edy Batara Mulya Siregar, MS.** **Bes. Heri Kusmanto., MA.**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

-----  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/22

**Telah diuji pada tanggal 26 April 2010**

**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS**

**Sekretaris : Drs. Karyono, MS**

**Pembimbing I : Ir. Abdul Rahman, MS**

**Pembimbing II : Ir. Erwin Pane, MS**

**Penguji Tamu : Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, MS**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

-----  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/22

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkankan kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Peranan Kredit Kelompok Petani Kecil dalam Pembinaan Usaha Sampingan di Kabupaten Deli Serdang dan Langkat” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen Agribisnis Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan rasa tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Bapak Ir. Abdul Rahman, MS sebagai pembimbing I, atas bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Ir. Erwin Pane, MS sebagai pembimbing II, atas bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini.

4. Bapak DR, Ir, Edy Batara Mulya Siregar, MS, Ketua Program studi Magister Manajemen Agribisnis Pascasarjana Universitas Medan Area, atas bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama kuliah di Program studi Magister Manajemen Agribisnis Pascasarjana Universitas Medan Area
6. Suami tercinta Muhammad Arif Hasibuan, SE serta putra putri kami Aisyiyah Hasibuan, M. Keb, Adewana Rmadhani Hasibuan dan Fasisal Syah Reza Hasibuan yang telah memberikan dorongan, motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang dan Langkat yang telah memberikan izin dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.
8. Rekan-rekan staf Balai Latihan Pegawai Lingkup Pertanian (BLPLP) yang telah banyak membantu untuk penyelesaian tesis ini.

**9. Teman-teman angkatan VI Program studi Magister Manajemen Agribisnis Pascasarjana Universitas Medan Area dan semua pihak yang telah membantu sampai selesainya penulisan tesis ini.**

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Medan, April 2010

Penulis



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/22

## RINGKASAN

Pengembangan pertanian mempunyai posisi yang sangat strategis sebagai penggerak perekonomian nasional. Pakar ekonomi dan pertanian mengatakan bahwa petani kecil adalah pelaku sektor agribisnis, maka pemerintah sudah sewajarnya memperhatikan dengan lebih serius terhadap kelompok petani kecil.

Salah satu kebijakan yang direkomendasi oleh pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan petani adalah program peningkatan pendapatan petani kecil (P4K) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian bekerja sama dengan BRI (Bank Rakyat Indonesia).

Program ini bertujuan untuk membina petani kecil yang berada di bawah garis kemiskinan, dalam rangka arahan merubah perilaku dan sikap terhadap kondisi kemiskinan yang dialaminya, sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya yang akhirnya diharapkan menjadi kelompok tani tangguh yang mandiri. Untuk itu diperlukan kelembagaan petani yang kuat melalui penumbuhan kelompok dan bantuan kredit.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertama, apakah ada peranan kredit yang diberikan oleh program pembinaan dan memberikan manfaat dalam menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan kelompok. Kedua, untuk jenis-jenis usaha sampingan, yang terdiri dari usaha budidaya, usaha industri rumah tangga dan usaha jasa. Ketiga, seberapa besar keterkaitan antara lambatnya realisasi kredit dengan kegiatan kelompok dan penyuluhan lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan.

Selama tahun 2007, telah tumbuh / dibentuk 98 kelompok petani kecil untuk Kabupaten Deli Serdang, dan 71 kelompok petani kecil untuk Kabupaten Langkat, dan 8 kelompok tidak aktif. Ketidakaktifan kelompok tersebut karena adanya keterlambatan realisasi kredit. Keaktifan dan kesadaran petani memperkuat kelembagaan dan keuangan petani dalam meningkatkan perekonomian keluarganya menjadi indikator tercapainya tujuan program. Kegiatan ekonomi dan jasa yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan kelompok juga dinikmati oleh masyarakat desa yang pada umumnya tinggal besama dalam satu lingkungan.

Keberhasilan program pembinaan petani kecil secara langsung membantu salah satu peran pemerintah daerah setempat dalam menciptakan pekerjaan dan mengurangi pengangguran khususnya kelompok petani kecil.

Dari hasil analisa di identifikasi beberapa masalah yang perlu diperhatikan untuk perkembangan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Perlunya pemerintah daerah secara penuh mengaplikasikan dan menggunakan model pembinaan kelompok petani kecil menjadi bagian dari program pembangunan pertanian di wilayahnya.
- Perlunya peningkatan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan penumbuhan dan bimbingan kelompok produktif.
- Perlunya peningkatan jumlah bantuan kredit, karena selama ini jumlahnya kurang memadai sebagai modal kerja yang disesuaikan dengan kondisi usaha sampingan petani.

Berdasarkan hasil kajian diperlukan beberapa alternatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi sebagai berikut :

- Pengelola program pembinaan mengadakan hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah setempat dan instansi terkait dengan cara menyampaikan laporan keberhasilan pembinaan, bahwa program dapat meningkatkan peran petani kecil dalam kegiatan usaha sampingan bersama dan memperoleh pendapatan tetap. Mengadakan kerjasama dengan instansi lain milik pemerintah atau non-pemerintah yang mempunyai visi dan misi serta kegiatan sejenis agar dapat bersinergi, dan kooperatif melaksanakan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
- Menambah pengetahuan penyuluh mengenai pembangunan masyarakat desa dan pengetahuan pasca panen serta pengetahuan industri pertanian di pedesaan. Dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup akan membantu menumbuhkan kelompok tani, sehingga dengan didukung oleh kelembagaan kelompok yang kuat untuk menjadi sentra produksi komoditas pertanian.
- Untuk meningkatkan kapasitas usaha bersama besarnya kredit yang diberikan sebagai modal kerja perlu ditingkatkan, waktu angsuran diperpanjang khususnya kelompok industri dan jasa.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
1.5. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kemiskinan Ditinjau dari Sudut Ekonomi .....	8
2.2. Kredit dalam Pembangunan Pertanian .....	9
2.3. Sumber Kredit Usaha .....	11
2.4. Pengelolaan dan Pengawasan Kredit Pertanian .....	13
2.5. Persyaratan Kredit Sektor Pertanian .....	14
2.6. Tanggung Jawab dan Peranan Pemerintah .....	15
2.7. Pengertian, Misi dan Sasaran Pembinaan Petani Kecil .....	17
2.8. Persyaratan dan Ketentuan Kredit .....	25
2.9. Prinsip-Prinsip Pembinaan .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Metode Penelitian .....	32
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.3. Pengumpulan Data .....	32
3.4. Data yang Dibutuhkan .....	33
3.5. Pengolahan Data .....	33

## **BAB IV GAMBARAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN PETANI KECIL**

4.1. Penumbuhan dan Pemberdayaan .....	35
4.2. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	37

## **BAB V ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH**

5.1. Perkembangan Kelompok .....	47
5.2. Kelembagaan Kelompok .....	49
5.3. Pelatihan .....	50
5.4. Sistem Penyaluran dan Pengembalian Kredit .....	52
5.5. Gambaran Manfaat yang diberikan Program P4K .....	55
5.6. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Bantuan Kredit .....	57
5.7. Kendala yang Dihadapi .....	57
5.8. Pemecahan Masalah .....	64

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1. Kesimpulan .....	71
6.2. Saran .....	73

## **DAFTAR PUSTAKA .....**75

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.a : Lokasi Pembinaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa ( Kabupaten Deli Serdang ) .....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 1.b : Lokasi Pembinaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa ( Kabupaten Langkat ) .....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 2.a : Keaktifan Kelompok untuk Kabupaten Deli Serdang .....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 2.a : Keaktifan Kelompok untuk Kabupaten Langkat .....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 3.a :Jenis Usaha Bersama Kelompok Petani Kecil Kabupaten Deli Serdang.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 3.b :Jenis Usaha Bersama Kelompok Petani Kecil Kabupaten Langkat.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 4 :Perkembangan Kelompok Usaha Kabupaten Deli Serdang dan Langkat.....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 5 :Kelembagaan Petani untuk Kabupaten Deli Serdang dan Langkat.....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 6 :Pelatihan Peningkatan Profesionalisme.....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 7 :Perkembangan Penyaluran Kredit Kabupaten Deli Serdang dan Langkat.....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 8 :Realisasi Angsuran Kelompok Tahun 2006.....</b>	<b>55</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Hingga saat ini perkembangan usaha agribisnis sebagai penggerak ekonomi pedesaan dinilai sangat lambat, diduga penyebabnya adalah karena terbatasnya akses petani pada kredit perbankan, sarana produksi, iptek dan pasar, juga karena lemahnya kelembagaan agribisnis di pedesaan yang belum dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi mitra bank maupun pasar (Soim, 2007).

Untuk membangun agribisnis daerah, peranan perbankan sebagai lembaga pembiayaan memegang peranan penting. Ketersediaan skim pembiayaan dari perbankan akan sangat menentukan maju mundurnya agribisnis daerah. Selama ini salah satu ketidakadilan yang dialami ekonomi daerah adalah sangat kecilnya alokasi kredit perbankan pada agribisnis daerah khususnya pada on farm agribisnis. Selama 30 tahun terakhir, keluaran kredit pada on farm agribisnis didaerah kurang dari 20 persen dari total kredit perbankan, padahal sekitar 60 persen

dari penduduk Indonesia menggantungkan kehidupan ekonominya pada on farm agribisnis (Saragih, 2001).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan desentralisasi akan lebih besar dari sebelumnya, termasuk dalam mengupayakan sumber-sumber dana pembangunan untuk membiayai dan menjalankan fungsinya melalui peningkatan pendapatan asli daerah.

Usaha-usaha yang banyak melibatkan petani kecil di pedesaan merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi dan juga cikal bakal usaha di sektor agribisnis yang dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam penumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus kepada petani kecil dengan segala aspek kegiatannya.

Pendapatan rata-rata rumah tangga pertanian masih berkisar Rp.300 ribu per kapita per tahun. Bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita nasional yang telah mencapai sekitar Rp. 2 juta, maka pendapatan per kapita mereka tersebut

rendah yakni sekitar 20% dari pendapatan perkapita nasional (Saragih, 2001).

Pengaruh globalisasi dapat membuat usaha petani skala besar dan skala kecil mempunyai peluang yang sama untuk berkembang. Pengaruh globalisasi yang bersifat positif seperti cepatnya informasi harga yang diterima memudahkan antisipasi perubahan pasar. Pengaruh yang sifatnya negatif misalnya pengusaha tidak mampu menanggulangi cepatnya informasi tersebut sehingga akan ketinggalan informasi terus-menerus (Sukartawi, 1996).

Saat ini petani kecil sebagai kekuatan ekonomi belum dapat diharapkan. Kendala dan masalah masih dialami antara lain kurangnya kemampuan dalam mengakses pasar, teknologi, sumber modal, berorganisasi dan bermitra dengan pihak lain. Petani tidak lagi hanya memproduksi sebanyak mungkin dan kemudian dijual di tingkat usaha tani tetapi juga dituntut untuk mengetahui selera dan kebutuhan konsumen. Petani dituntut untuk lebih memahami pasar, hukum penawaran dan permintaan, tanggap terhadap teknologi baru dengan cara-cara memanfaatkan sumber modal pinjaman. Untuk mengisi dan meningkatkan kemampuan petani tersebut adalah tugas pemerintah. Pemerintah

dengan segala kekuatannya akan membantu kelompok in melalui kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok tani kecil dalam gerakan ekonomi kerakyatan (Saragih dan Krisnamurthi, 1992).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Departemen Pertanian di tingkat pusat dan BLPLP di tingkat propinsi sedang melaksanakan program pemberdayaan kelompok petani kecil yang disebut dengan program P4K, yang dalam pelaksanannya bekerjasama dengan BRI. Pembinaannya dilakukan sampai sekarang. Program dilaksanakan di lokasi pilot proyek yaitu Kabupaten Deli Serdang di Kecamatan Galang dan Pagar Merbau, dan Kabupaten Langkat di Kecamatan Tanjung Pura dan Hinai.

Disamping bimbingan teknis oleh penyuluhan lapangan bantuan kredit merupakan salah satu faktor bagi pertumbuhan dan pengembangan kelompok usaha bersama. Oleh karena hal tersebut maka penyaluran kredit harus diteruskan sampai semua kelompok menerimanya. Pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam menyediakan dana bantuan yang dibutuhkan petani. Dengan penyaluran dana yang lancar kepada petani, maka kelompok petani kecil yang berada di bawah pelayanannya akan

akan mempunyai kesempatan pekerjaan yang layak dan mempunyai pendapatan tetap.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok masalahnya menjadi dua pokok masalah yaitu :

1. Kelompok petani kecil dalam melaksanakan usaha bersama sangat tergantung kepada bantuan kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui program pembinaan peningkatan pendapatan petani kecil, tetapi dalam pelaksanannya menghadapi ancaman kurangnya penyediaan dana.
2. Pemerintah daerah belum sepenuhnya menyadari bahwa kelompok petani kecil merupakan pelaku-pelaku agribisnis di pedesaan yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Memperoleh gambaran manfaat apa saja yang diberikan program tersebut kepada petani dan seberapa besarnya motivasi petani menggunakan bantuan kredit dalam menunjang usahanya.

2. Mengetahui faktor-faktor keberhasilan bantuan kredit yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan usaha petani beserta keluarganya.
3. Mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai acuan dan sarana belajar dalam memahami pemberdayaan program masyarakat tani dalam peningkatan kemampuan berusaha dalam kelompok dan peranan kredit yang terkait didalamnya.
2. Pelaksanaan program pembinaan kelompok petani kecil dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan pembinaan pada masa mendatang.
3. Sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya dengan bidang kajian yang sama.

#### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulisan ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu pada kantor Balai Latihan Pegawai Lingkup Pertanian (BLPLP) Gedung Johor Medan yang antara lain meliputi

pembinaan sebagai salah satu kebijakan pengentasan kemiskinan. Pencapaian hasil program mengenai penumbuhan dan pengembangan kelompok. Ketentuan-ketentuan penyaluran kredit yang mendidik. Prinsip-prinsip pembinaan dan pelayanan. Pengumpulan informasi dari petugas, petani, aparat kecamatan dan desa dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi.

Ruang lingkup penulisan dibatasi pada peranan kredit yang dapat meningkatkan kemampuan kelompok petani kecil dalam melaksanakan usahanya khusus pada program pembinaan kelompok petani kecil.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kemiskinan Ditinjau Dari Sudut Ekonomi

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya.

Tingkat pendapatan sering dipakai sebagai ukuran keadaan kemiskinan seseorang. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif adalah pendapatan kelompok tertentu yang belum seimbang dengan kelompok lain karena ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Dari penyebab kemiskinan dapat dibedakan dalam beberapa pengertian yaitu kemiskinan natural, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan karena dari asalnya memang miskin, kelompok miskin ini karena tidak memiliki sumber daya alam dan sumber daya lain yang memadai. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dicerminkan oleh sikap atau gaya hidup dan budaya masyarakat tersebut. Kelompok ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan untuk melakukan perubahan, menolak dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki kehidupannya, sering mereka tidak mau disebut miskin (Ginanjar, 1993).

## 2.2. Kredit Dalam Pembangunan Pertanian

Fungsi kredit di sektor pertanian tidak dapat disamakan dengan sektor lainseperti industri, perdagangan, perumahan dan jasa lainnya karena produksi pertanian bersifat musiman hasilnya tergantung pada manajemen usaha tani dan kondisi alam sehingga dimasa mendatang hanya mudah untuk diramalkan tetapi sulit untuk direalisasikan.

Untuk meningkatkan produksi sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat diperlukan tambahan investasi. Namun seringkali petani tidak dapat melakukannya dengan baik karena hasil yang diperoleh dari pertanian hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagai petani yang hanya mampu mempunyai lahan yang sempit serta kemampuan teknologi yang sangat terbatas pula, maka sulit diharapkan mereka dapat mencapai kehidupan yang layak dari hasil usaha tersebut. Selain pada budi daya petani dapat juga memanfaatkan waktunya untuk meluaskan lapangan kerja baru atau menambah nilai komoditi yang dihasilkan bahkan sama sekali usaha baru yang dapat dikerjakan.

Modal yang cukup, teknologi dan sistem manajemen yang lebih baik akan membantu meningkatkan produktivitas usaha pertanian. Modal yang cukup akan menjamin kelancaran pemeliharaan lahan, tanaman, ternak, ikan, peralatan, bangunan, dan jasa yang diperlukan. Modal dapat diperoleh melalui sumber-sumber yang berbeda misalnya diperoleh dari sisa atau kelebihan hasil penjualan, warisan, bantuan pemerintah berupa bantuan kredit, pinjaman di pasar uang.

Pengelolaan dan pemanfaatan modal secara efektif akan membantu meningkatkan produksi dan membantu meningkatkan investasi baru, tetapi pemanfaatan modal yang salah akan mengakibatkan kerugian bahkan akan menyebabkan terlikuidasinya sebuah usaha kaerna salah menghitung resiko-resiko yang harus ditanggungnya.

### 2.3. Sumber Kredit Usaha

Sumber pembiayaan kredit pertanian yang selama ini sudah dikenal yaitu bantuan pasar uang, pemerintah atau bank, koperasi, dan bantuan luar negeri. Masing-masing sumber mempunyai sistem pelaksanaan dan akibat yang berbeda terhadap petani (Damanik, 2002). Sumber kredit tersebut adalah:

1. Sumber pasar uang yang tak terorganisir dalam kegiatan hasil pertanian maupun yang diorganisir dalam kegiatan kredit dagang. Pedagang tidak mengenakan bunga tetapi sudah menaikkan harga dagangannya. Petani membayar hasil produksi petani dengan harga rendah. Atau bentuk lain seperti ijon, sistem pembelian hasil produksi pertanian sebelum masa panen tidak dengan harga dibawah atau lebih rendah daripada harga yang sudah siap panen. Bentuk-bentuk kredit

tersebut diatas merupakan keputusan-keputusan yang diambil pedagang lebih banyak merugikan petani.

2. Sumber kredit bantuan pemerintah atau bank, dalam pengorganisasianya dan pendekatan sistem yang digunakan kadang tidak disinkronkan dengan kondisi dan kegiatan petani. Banyak program bantuan kredit yang telah disiapkan oleh pemerintah melalui bank tetapi kurang berhasil. Sebagai contoh penyaluran, Kredit Usaha Tani kurang lebih 40 persen yang dapat direalisasikan dan dibayar kembali oleh petani (Waluyo dan Djauhari, 1992). Hal ini kemungkinan bahwa bank tidak mampu menjangkau dan mengawasi sampai kepada petani secara langsung.
3. Sumber kredit koperasi sampai saat ini dianggap paling sesuai sebagai kredit usaha pertanian dengan alasan ada kontak langsung antara pemberi dan penerima kredit, kondisi petani menjadi pertimbangan dalam sistem dan tidak terlalu menekankan pada jaminan dan keuntungan.
4. Sumber keuangan dan bantuan teknik luar negeri, sering mengalami kekurangan dana pendamping yang dapat disediakan oleh negara peminjam. Aturan yang kadang sarat dengan muatan politik yang sering merugikan negara

peminjam. Ketergantungan negara penerima bantuan sangat tinggi kepada negara donor dalam melaksanakan aturan yang telah disepakati yang terkesan mendikte pada hal-hal teknis di lapangan.

#### **2.4. Pengelolaan dan Pengawasan Kredit Pertanian**

Sistem pengelolaan kredit menentukan keberhasilan suatu implementasi kredit apakah digunakan sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kredit yang dikelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya akan meningkatkan pengembangan kinerja seperti perbaikan sistem dan proses produksi melalui inovasi baru, renovasi alat tua, pembelian alat-alat baru, perluasan lahan pertanian. Ketidakdisiplinan dan ketidakjujuran petani atau petugas pembina dapat menyebabkan ketidaklancaran penyaluran dan pengembalian kredit bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. (Hermanto, 1992).

Pemilihan sistem pengelolaan bantuan menentukan keberhasilan penyaluran dan pengembalian kredit seperti cara pemberian, bentuk kredit yang dipilih, sistem distribusi dan

suplai khusus untuk usaha pengolahan hasil benih, pupuk, peralatan, jasa konsultasi dan mediasi. (Hermanto, 1992).

## **2.5. Persyaratan Kredit Pada Sektor Pertanian**

Persyaratan utama yang penting dalam mengembangkan sistem perkreditan di sektor pertanian (Datmanik, 2002) adalah:

1. Penerima kredit mempunyai identitas yang jelas.
2. Penerima kredit dapat dipercaya.
3. Penerima kredit punya ketergantungan khusus dengan program pengembangan.
4. Sudah ada target dan sasaran jumlah dan siapa sebagai penerima kredit.
5. Penerima kredit merupakan pemilik bukan penyewa (khusus untuk budidaya).
6. Besarnya kredit hanya untuk mencukupi modal kerja saja, karena pengaruh lingkungan yang mempunyai resiko kegagalan sangat tinggi.
7. Bunga serendah mungkin atau tidak dikenakan sama sekali.
8. Waktu realisasi kredit disesuaikan dengan realisasi produk.
9. Biaya atau beban tertentu dapat ditanggung oleh pemerintah.

- 10. Besarnya kredit waktu pengembalian besarnya pengembalian dipertimbangkan dengan kemampuan dan jenis komoditi yang diusahakan.**
- 11. Diberikan bimbingan dan arahan terhadap penggunaan kredit sehingga tidak menyimpang pada usaha lain yang tidak produktif.**

## **2.6. Tanggung Jawab dan Peranan Pemerintah**

Tanggung jawab dan peran pemerintah adalah membantu dalam kelancaran pemberian kredit dan mengawasi secara khusus terhadap keberhasilan dengan cara membuat dan menciptakan suatu sistem beserta aturannya (Damanik, 2002) antara lain :

- 1. Menetapkan dan mendorong institusi keuangan pemerintah maupun swasta agar mau memberi bantuan kredit permodalan kepada petani kecil.**
- 2. Melakukan sistem pengawasan dan sistem kontrol pada semua institusi dan pemeran jasa yang berhubungan dengan pemberian kredit pertanian.**

3. Menciptakan peraturan batas bunga tertinggi pinjaman dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pemberian kredit tersebut.
4. Menyederhanakan serta memperjelas semua prosedur tentang hak dan kewajiban penerima bantuan kredit.
5. Menjamin adanya aturan dan ketentuan tabungan dan asuransi kapital.
6. Memberikan perhatian dan penilaian secara objektif yang merupakan garansi terhadap pembayaran kembali kredit yang telah digunakan.
7. Mempertimbangkan keinginan kedua belah pihak dimana sering terjadi kesalahpahaman diantara mitra penerima dan pemberi kredit.
8. Membantu aturan terhadap musibah bencana alam dan usaha yang rusak.
9. Mengkoordinir kasus-kasus pembayaran hutang yang tidak sesuai dengan waktu berupa keringanan pembayaran antara lain :
  - Aturan kepastian penggunaan kredit misalnya aturan suplai, peluang pasar, perencanaan pembangunan

industri, pembangunan gudang, aturan pembelian dan perbaikan alat-alat.

- Penyebaran informasi mengenai institusi perkreditan, data statistik, teknologi baru, hasil pengkajian.
- Sektor pendidikan SDM dalam mengelola kredit.
- Mengenalkan dan bergaul dengan institusi perkreditan dan institusi pasar.
- Mengkoordinir dan melibatkan pengambil keputusan politik pemerintah maupun swasta sesuai dengan peran masing-masing untuk terlibat dalam sektor pertanian.

## 2.7. Pengertian, Misi dan Sasaran Pembinaan Petani Kecil

Proyek P4K merupakan suatu proyek penyuluhan pertanian yang ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan kelompok petani kecil agar mau dan mampu menjangkau fasilitas yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Pemberdayaan kelompok petani kecil memerlukan keikhlasan dan kesungguhan, karena dilandasi oleh sikap saling asah, saling asih dan saling asuh (Zachri, 2002).

Kemiskinan yang diikuti oleh pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian menjadi ketimpangan dalam masyarakat merupakan tantangan dalam pembangunan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada peluang ekonomi sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya. Upaya penanggulangan dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin oleh mereka sendiri melalui suatu proses pendidikan yang berkelanjutan dengan prinsip “menolong diri sendiri melalui peningkatan kemampuan (*help them to help themselves*). Dengan demikian mampu mengali dan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya untuk menjangkau berbagai kemudahan yang tersedia baik dalam aspek sumberdaya, permodalan, teknologi maupun pasar.

Kemampuan petani kecil untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya secara mandiri akan makin berkembang sejalan dengan makin kuatnya keyakinan diri mereka. Bila mereka merasakan perubahan apa yang telah mereka alami dan mereka mampu menilai perubahan itu, akan makin memperkuat keyakinan diri mereka bahwa mereka

sanggup mengatasi masalah kemiskinan dengan kekuatan sendiri.

Selain itu pengalaman tersebut juga akan dapat memperkuat solidaritas mereka untuk membantu anggota-anggota kelompok yang tingkat perubahan sosial ekonominya lambat. Untuk membangun 'pengalaman tersebut, P4K menyediakan suatu proses belajar bagi petani kecil untuk menilai dan memahami perubahan apa yang telah mereka alami. Proses belajar seperti itu dapat dilakukan dengan cara partisipatif yaitu dengan merumuskan ciri-ciri kondisi sosial ekonomi yang berlaku di masyarakat setempat. Dengan memahami perubahan yang terjadi dalam kondisi sosial ekonomi mereka selama ini akan dapat menyediakan suatu bahan penilaian bagi mereka apakah perubahan itu sudah sesuai dengan harapan mereka apa belum, dan bagaimana sikap mereka selanjutnya (Rasyid, A, 2002).

Dalam program P4K, para petani kecil dibimbing, dimotivasi untuk bergabung dalam sebuah kelompok petani kecil. Selain merupakan persyaratan untuk memperoleh kredit dari BRI dengan berkelompok para petani kecil dapat belajar mendengarkan pendapat orang lain, belajar menyampaikan

pendapat, juga saling membantu antara sesama anggota. Dimana alasan berkelompok dari petani kecil tersebut yaitu untuk mengembangkan usaha dan memperoleh informasi tentang cara-cara memperbaiki kualitas produksi, mempunyai kesempatan bertukar pikiran dengan sesama anggota, dan petani dapat memecahkan masalah yang dihadapi (Sangun, E, dkk, 2005).

### **Karakteristik Umum Penduduk Miskin dan Sangat Miskin**

<b>Indikator</b>	<b>Sangat Miskin</b>	<b>Miskin</b>
Kecukupan pangan dan daya beli	Tidak cukup pangan. Lebih dari 70% pendapatannya dikeluarkan untuk pangan. Memerlukan pinjaman modal untuk membeli pangan.	Kurang cukup pangan. Sekitar 50% pendapatan dikeluarkan untuk pangan. Pada waktu tertentu memerlukan pinjaman modal untuk membeli pangan.
Pemilikan lahan	Tidak memiliki lahan, menyakap.	Memiliki lahan sempit, menyakap.
Penggunaan input pertanian	Tidak menggunakan input kecuali diperoleh dari bantuan	Pada waktu tertentu menggunakan pupuk dan pestisida
Penggunaan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan	Hanya menggunakan tenaga kerja keluarga. Lapangan kerja musiman.	Sewaktu-waktu menggunakan tenaga kerja yang diupah.

Pemanfaatan utilitas	Tidak tersedia, memanfaatkan sumber air minum tradisional	Tersedia sedikit utilitas. Memiliki sumber air minum yang layak.
Rumah dan kepemilikan	Rumah sederhana, atap rumbia, dan lantai tanah.	Rumah sederhana, dari kayu atau semi permanen dengan lantai tanah atau papan.
Pendidikan anak	Tidak pernah sekolah atau tidak lulus SD	Sampai SD
Kendaraan	Tidak punya atau mempunyai sepeda	Memiliki satu atau dua sepeda
Alat transportasi umum	Pada waktu-waktu tertentu mampu memanfaatkannya	Mampu memanfaatkan transportasi umum dan lebih sering
Ternak (diluar unggas)	Tidak punya	Hanya ternak domba atau kambing
Barang berharga	Tidak mempunyai barang berharga dan emas	Memiliki sedikit barang berharga (radio) dan sedikit emas
Bahan bakar	Kayu bakar	Kayu bakar, minyak tanah
Akses pelayanan kesehatan	Menggunakan pengobatan tradisional	Pengobatan tradisional dan layanan kesehatan formal
Sumber penghasilan	Dari kegiatan bertani	Kegiatan bertani dan non pertanian
Jarak rumah kepasar	Lebih dari 10 km, dengan akses yang sulit	Kurang dari 10 km, akses lebih mudah
Jumlah anggota keluarga	Lebih dari 6 orang	Kurang dari 6 orang

Sumber : Diadaptasi dari FAO, 1997, *Rural Income Generation Project Preparation Report*. (Main Report)

**Indikator yang digunakan dalam menentukan kecamatan binaan, desa binaan meliputi :**

- a. Banyaknya masyarakat miskin di wilayah tersebut.
- b. Potensial ekonominya
  - Mata pencaharian beragam (produksi, pengolahan hasil, kerajinan, dan lain-lain).
  - Pasar hasil produksi.
  - Transportasi.
- c. Mudah dalam pembinaan.
- d. Sikap tanggap masyarakat di wilayah tersebut

Petani-petani kecil adalah keluarga petani dengan tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan yang bila dihitung sama dengan 320 kg setara beras per orang per tahun (Sayogjo, 1980). Mereka adalah para petani pemilik dan pengelola lahan sempit, penggarap, buruh tani, dengan peralatan sederhana. Mereka dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Rumah dan barang yang dimiliki terbatas dan sederhana dibandingkan dengan rata-rata pemilikan sekitarnya.
- Tingkat kesehatan dan pendidikan rendah.
- Produktivitas kerja rendah.

- Keterampilan, manajemen usaha dan pemasaran masih lemah.
- Usaha umumnya bersifat subsistem, belum berorientasi pasar, teknologi yang diterapkan masih tradisional.
- Kurang tanggap terhadap penbaharuan dan kurang mampu melihat peluang yang ada disekitarnya.

*Kelompok Petani Kecil* adalah kumpulan petani-petani kecil peserta program P4K yang atas kemauannya sendiri sepakat untuk membentuk kelompok. Berkelompok atas dasar kesamaan kepentingan dan tujuan, mempunyai ketua yang berasal dari mereka sendiri, jumlah anggota antara delapan sampai enam belas keluarga untuk Jawa, Bali, NTB dan antara lima sampai enam belas keluarga untuk provinsi lainnya termasuk Sumatera Utara.

*Penumbuhan Kelompok Petani Kecil* adalah serangkaian kegiatan dan pertemuan untuk menentukan calon peserta program, dimulai dari identifikasi calon, supaya pembimbingan organisasi dan manajemen kelompok sampai mereka menyadari manfaat kelompok dan bersepakat untuk membentuk kelompok petani kecil.

*Pemberdayaan Kelompok Petani Kecil adalah serangkaian kegiatan yang mengajak petani-petani kecil anggota kelompok petani kecil, dalam bentuk serangkaian kegiatan pendampingan, agar mau dan mampu menjangkau dan mengakses berbagai aspek sumberdaya permodalan, aspek teknologi dan aspek pasar.*

*Kelompok Petani Mandiri adalah kelompok petani kecil yang jumlah anggotanya telah mampu merencanakan dan memutuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Untuk mengembangkan usahanya mampu mendapatkan tambahan modal dari berbagai sumber permodalan yang tersedia.*

*Misi Pembinaan :*

1. Membangun pembinaan Kelompok Petani Kecil agar memiliki rasa percaya diri untuk menghadapi kehidupan dan penghidupanya.
2. Memberdayakan Kelompok Petani Kecil dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.
3. Mengupayakan tumbuh dan kembangnya iklim dan sistem pelayanan yang mendukung kegiatan usaha produktif Kelompok Petani Kecil. Memperkuat kelembagaan petani kecil untuk meningkatkan kemampuan kerjasama, dan skala ekonomi usahanya.

*Sasaran Pembinaan :*

Sasaran pembinaan adalah keluarga petani kecil yang pendapatannya masih dibawah 320 Kg setara dengan beras per kapita per tahun. Agar tepat dalam memilih akan digunakan metoda *Participatory Rural Appraisal* di tingkat desa Kelompok Petani Kecil yang telah tumbuh akan dilanjutkan sehingga kualitasnya semakin meningkat.

**2.8. Persyaratan dan Ketentuan Kredit**

**2.8.1 Persyaratan Kelompok Petani Kecil calon pemimnjam :**

- Petani kecil yang terdaftar dengan jelas oleh penyuluhan pertanian.
- Kelompok Petani Kecil yang dibina oleh lembaga lain dan sudah didaftarkan pada Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten.

**2.8.2 Persyaratan Kelompok Petani Kecil Yang Akan Mengajukan Kredit P4K**

- Ketua dan sekretaris Kelompok Petani Kecil memiliki surat kuasa dari anggota untuk menerima pinjaman dan

**pernyataan bersedia membayar kembali atas nama anggota secara tanggung renten.**

- Memiliki Rencana Usaha Bersama (RUB) tertulis yang disusun oleh Kelompok Petani Kecil, ditandatangani ketua dan sekretaris Kelompok Petani Kecil dan diketahui oleh Penyuluhan Pertanian.
- Pada saat pengajuan kredit, Kelompok Petani Kecil tidak mempunyai kewajiban membayar pengembalian kredit pada bank atau lembaga perkreditan lainnya, baik secara kelompok maupun individu.
- Memiliki tabungan di BRI berupa Tabanas/Simpedes minimal lima persen dari besarnya kredit, tabungan disetor tunai bukan berasal dari pinjamannya.
- Kelompok Petani Kecil yang baru pertama kali mengajukan kredit haruslah yang sudah dibentuk dan dibina minimal enam bulan.

### **2.8.3 Ketentuan Kredit**

- Besar kredit, kredit adalah modal kerja yang diberikan secara bertahap yang pada setiap tahapan diberikan secara sekaligus.

- Suku bunga pertahun efektif tanpa denda bunga, suku bunga kredit akan ditinjau kembali setiap enam bulan.
- Provisi kredit dan komitmen tidak dipungut.
- Biaya ganti materai perjanjian kredit sesuai dengan ketentuan.
- Bentuk kredit adalah bayar dimuka.
- Agunan kredit adalah semua benda dan modal usaha bersama Kelompok Petani Kecil yang diberi dari kredit serta tabungan kelompok.
- Tanggung jawab peminjam ditanggung bersama atau tanggung renteng, bagi anggota yang meninggal dunia, pindah tempat dan lain-lain dibebankan kepada anggota lain secara tanggung renteng dan kedudukannya tidak diganti oleh anggota baru.
- Kegagalan usaha yang disebabkan oleh musibah, ketua Kelompok Petani Kecil didampingi penyuluhan pertanian segera melapor kepada BRI dengan disertai berita acara terjadinya musibah yang diketahui oleh Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL), BRI segera mengecek dan mengambil tindakan sesuai dengan kondisinya.

- Penilaian terhadap kondisi kegagalan, Kelompok Petani Kecil tetap membayar apabila dinilai masih mampu mengembalikan, dan dapat diberi pinjaman tambahan bila dinilai dapat melanjutkan usaha kembali dan dapat mengembalikan pinjaman.
- Keputusan kredit sepenuhnya berada pada BRI sebagai bank pelaksana.
- Jenis usaha bersama dipilih yang berorientasi pasar, cepat menghasilkan, menguntungkan, adanya peran anggota Kelompok Petani Kecil, antara lain : industri rumah tangga, budidaya pertanian, dan usaha jasa.
- Macam usaha yang diberi kredit adalah segala jenis usaha kelompok yang produktif, menguntungkan, dapat dikerjakan sendiri oleh kelompok petani kecil, menghasilkan relatif cepat, antara lain budidaya pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.
- Contoh jenis usaha kelompok petani kecil yang secara langsung dan tidak langsung menunjang agribisnis produksi, perdagangan, industri rumah tangga, dan jasa seperti kerajinan tangan dengan bahan kayu (meja, kursi), kerajinan tangan dari tanah (bata, genteng, pot), kerajinan

tangan dengan bahan lain (baju, celana), kerajinan tangan dengan bahan baku logam (rak piring, kuali, dandang), kerajinan tangan dari bahan baku pertanian (ijuk, rotan, kulit kayu, rami, daun pandan, daun kelapa, lidi, daun enceng gondok, sabut kelapa, dan lain-lain).

- Kelompok petani kecil tidak dibenarkan merubah jenis usaha yang telah mendapat persetujuan BRI, kecuali mendapat persetujuan dari Petugas Pelaksana Tingkat Kabupaten (PPTK), perubahan yang menyimpang dianggap melanggar perjanjian, maka BRI menghentikan kredit dan Kelompok Petani Kecil segera menyelesaikan kewajibannya dengan BRI.

## 2.9. Prinsip-Prinsip Pembinaan

### Prinsip Berkelompok

Pendekatan dilakukan agar peserta program mau dan mampu bekerjasama dalam kelompok, dengan berkelompok tumbuh kekuatan gerak dari kelompok petani kecil, kelompok tumbuh dari, oleh dan untuk para kelompok petani kecil sendiri.

Selain dengan anggota kerjasama juga dikembangkan antar

kelompok, dan mitra kerja lainnya agar usaha semakin berkembang sehingga dapat membentuk kelembagaan ekonomi formal. Ada 2 prinsip berkelompok yang dikembangkan yaitu :

- Keserasian, anggota kelompok petani kecil terdiri dari petani-petani yang saling mengenal, saling mempercayai dan mempunyai kepentingan yang sama diharapkan akan tumbuh kelompok petani kecil yang kompak dan serasi.
- Kepemimpinan dari mereka sendiri, ketua dan pengurusannya dipilih dan ditentukan sendiri. Akan lebih memahami masalah serta keinginan anggota. Keaktifan dan kreatifitas pemimpin akan membawa kelompok kearah kemandirian dan perkembangan yang baik, maka kelompok petani kecil perlu dimotivasi agar dapat menentukan dan memilih sendiri dengan tepat.

### **Prinsip Pendekatan Kemitraan**

Petani kecil dalam bekerja akan bermitra dengan berbagai pihak seperti penyuluhan pertanian, gabungan kelompok petani kecil, petugas dinas, LSM, dan kelompok lain yang terkait.

## **Prinsip Kesatuan Keluarga**

Kelompok petani kecil tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh, kepala keluarga beserta anggota keluarga merupakan pemicu dan pemicu kemajuan usaha. Prinsip ini menuntut penyuluhan memberdayaan seluruh anggota keluarga untuk aktif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

## **Prinsip Belajar Menemukan Sendiri**

Kelompok petani kecil tumbuh dan berkembang atas dasar kemauan dan kemampuan untuk belajar menemukan sendiri apa yang dibutuhkan dan apa yang akan dikembangkan temasuk upaya untuk mengubah kehidupannya.

## **Prinsip Kepemimpinan Dari Kelompok Petani Kecil**

Memberikan seluas-luasnya kepada petani untuk mengembangkan kepemimpinan dari kalangan mereka sendiri.

## **Prinsip Keswadayaan**

Sejak saat pertumbuhan kelompok petani kecil sudah didorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan sendiri, tidak selalu menggantungkan bantuan dari luar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Deskriptif yaitu melalui survey dan wawancara langsung dengan pihak yang terkait yang memiliki hubungan dengan data dan informasi yang diteliti.

#### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Galang dan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, dan di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Penelitian dilaksanakan dalam waktu delapan minggu dimulai pada bulan Pebruari dan berakhir pada bulan Maret 2010.

#### **3.3. Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan cara mengadakan wawancara, diskusi dan pengamatan langsung di kelompok petani yang berada di lokasi Binaan Kabupaten dan Kecamatan serta kantor

BLPLP sebagai pusat data. Data yang terkumpul dilengkapi dengan data dari responden yang diperoleh melalui daftar pertanyaan agar terarah dan terfokus pada informasi yang dimaksud.

### **3.4. Data Yang Dibutuhkan**

Data yang dianalisis adalah data primer dan data skunder:

- Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan anggota kelompok petani kecil yang meliputi jumlah anggota kelompok, jenis-jenis usaha sampingan, pemberian kredit pinjaman serta manfaat dari pembinaan.
- Data skunder yang diperoleh dari Balai Latihan Pegawai Lingkup Pertanian (BLPLP), Dinas Pertanian Sumatera Utara dan Badan Pusat Statistik (BPS).

### **3.5. Pengolahan Data**

Berdasarkan hasil pengumpulan data maka data yang diperoleh dilakukan langkah pembuatan tabulasi data.

Untuk mengetahui apakah ada tidaknya peranan kredit dalam memperlancar penumbuhan dan pengembangan kelompok

petani kecil dilakukan terhadap tiga jenis analisis meliputi kondisi kelompok petani kecil, pengembangan kelompok petani kecil dan penyaluran pengembalian kredit.

**Kondisi Kelompok Petani Kecil** yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi kelompok petani kecil secara umum setelah diberikan pembinaan dan menerima kredit dari program. Tingkat penumbuhan kelompok dengan berbagai keaktifan dan jenis usaha kelompok petani kecil yang terjadi di masyarakat tersebut.

**Perkembangan petani kecil** yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah prestasi selama dilakukan pembinaan sekian tahun dinikmati oleh petani dan adakah perubahan sikap petani terhadap pentingnya pembinaan itu sendiri bagi kemajuan dirinya dan peran penyuluhan dalam membentuk kelompok.

**Penyaluran dan pengembalian kredit** yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran sistem penyaluran kredit prosedur dan peran penyuluhan dalam memperlancar prosedur.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN PROGRAM PEMBINAAN**

#### **PETANI KECIL**

#### **4.1. Penumbuhan dan Pemberdayaan**

##### **4.1.1. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas**

Petani kecil yang bergabung dalam kelompok petani kecil didorong agar berkembang menjadi kreatif, produktif, disiplin dan mandiri, dengan demikian dapat meningkatkan peran serta dalam meningkatkan kesejahteraannya.

##### **4.1.2. Mampu mencari dan menjangkau sumber-sumber permodalan**

Petani kecil yang bergabung dalam kelompok petani kecil didorong untuk mampu mencari sumber-sumber permodalan yang tersedia pada lembaga keuangan dan perbankan, menjadi nasabah terpercaya, dapat menghitung kebutuhan modal dan dapat melunasi hutang pada waktunya.

#### **4.1.3. Penumbuhan kelembagaan Petani kecil**

Petani kecil atas dasar kemauan dan kemampuannya menjadi kelembagaan petani yang tangguh membentuk koperasi sehingga memiliki posisi kuat dalam arus perekonomian.

#### **4.1.4. Mengembangkan pasar dan teknologi tepat guna**

Petani kecil yang mempunyai kelembagaan yang kuat akan mampu menjangkau dan mengembangkan pasar dan mampu menguasai serta mampu memanfaatkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas produk dan permintaan pasar.

#### **4.1.5. Beberapa langkah pelayanan yang dilakukan oleh penyuluh kelompok**

Identifikasi lokasi pembinaan, membentuk kelompok pelayanan menabung, mendapatkan dan mengembalikan kredit, melaksanakan usaha bersama, kerjasama antar kelompok, sampai dengan kelompok siap memperoleh bimbingan dari petugas lain yang diperlukan oleh kelompok. Khusus paket bantuan kredit sebagai sarana belajar kelompok oleh penyuluh dilayani mulai dari pra pembuahan dengan memberikan kredit tahap satu dan dua selama dua tahun. Penyuluh melanjutkan pemberian kredit tahap ketiga dan keempat. Akhirnya

kelompok melakukan sendiri langsung dengan bank atau gabungan kelompok lain.

## 4.2. Gambaran Umum Daerah Penelitian

### 4.2.1. Lokasi

Kabupaten Deli Serdang yaitu di Kecamatan Galang dan Pagar Merbau pada lima belas desa dan untuk Kabupaten Langkat di Kecamatan Tanjung Pura dan Hinai merupakan daerah terpilih dan terbesar pada dua belas desa.

### 4.2.2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Kabupaten Langkat memiliki luas areal  $\pm 6.263,29 \text{ km}^2$  (626,329 Ha). Jumlah desa dan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Langkat terdiri dari 20 kecamatan dan 226 desa. Kecamatan Hinai memiliki luas wilayah  $114,28 \text{ km}^2$  (114,28 Ha) dengan 12 desa dan jumlah penduduk 45.781 jiwa, sedangkan di Kecamatan Tanjung Pura luas wilayahnya  $165,78 \text{ km}^2$  (165,78 Ha) dengan 19 desa dan jumlah penduduk 69.071 jiwa, dengan persentase penduduk miskin 19,89 persen.

Kabupaten Deli Serdang, untuk Kecamatan Galang yang terletak pada ketinggian 11-500 m dpl, dengan luas 150,29 km<sup>2</sup> (150,29 Ha) yang mencakup sebanyak 28 desa dengan jumlah penduduk 65.752 jiwa. Sedangkan untuk Kecamatan Pagar Merbau dengan luas 62,89 km<sup>2</sup> (62,89 Ha) terdiri dari 16 desa serta jumlah penduduk 32.355 jiwa.

#### **4.2.3. Pendidikan**

Di Kabupaten Lngkat dan Deli Serdang ± 76 persen penduduk berumur 10 tahun keatas tidak sekolah lagi, dan menunjukkan bahwa mereka sudah aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan ± 2 persen masih buta huruf dan belum sekolah. Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya dengan menurunkan angka kemiskinan dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. pemerintah menyadari bahwa untuk menyusun strategi dan program penanggulangan kemiskinan diperlukan data dan informasi tentang realitas kemiskinan baik untuk target kewilayahan maupun sasaran (kelompok masyarakat secara langsung).

**Tabel. 1a. Lokasi Pembinaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa (Kabupaten Deli Serdang).**

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelompok	Jumlah Anggota
Deli Serdang	1. Galang	1. Jahrum A 2. Jaharum B 3. Kotasan 4. Pertangguhan 5. Paku 6. Kotangan 7. Paya Kuda	12 11 7 11 4 9 8	48 40 28 44 16 36 32
	2. Pagar Merbau	1. Sumber Rejo 2. Purwodadi 3. Suka Mandi Hilir 4. Pagar Merbau II 5. Suka Mulia 6. Tanjung Mulia 7. Tanjung Garbus 8. Tanjung Garbus Kampung	4 8 4 3 5 4 5 3	16 32 16 12 20 16 20 12
	Jumlah			98
				388

Untuk daerah Kabupaten Deli Serdang jumlah kelompok yang terbentuk di Kecamatan Galang adalah 61 kelompok yang terdiri dari 7 desa, antara lain di Desa Jaharum A (12 kelompok), Desa Jaharum B (11 kelompok), Desa Kotasan(7 kelompok), Desa Pertangguhan (11 kelompok), Desa Paku ( 4 kelompok), Desa Kotangan (9 kelompok), dan Desa Paya Kuda (8 kelompok). Di Kecamatan Pagar Merbau jumlah kelompok yang terbentuk adalah 36 kelompok yang terdiri dari

8 desa, antara lain Desa Sumber Rejo (4 kelompok), Desa Purwodadi (8 kelompok), Desa Suka Mandi Hilir (4 kelompok), Desa Pagar Merbau II (3 kelompok), Desa Suka Mulia (5 kelompok), Desa Tanjung Mulia (4 kelompok), Desa Tanjung Garbus II (5 kelompok), Tanjung Garbus Kampung (3 kelompok).

**Tabel. 1b. Lokasi Pembinaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa (Kabupaten Langkat).**

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelompok	Jumlah Anggota
Langkat	1. Hinai	1. Muka Paya 2. Paya Renggas 3. Pasar VIII 4. Kebun Lada 5. Suka Damai 6. Cempa	5 2 3 5 5 7	25 10 15 25 25 45
	2. Tanjung Pura	1. Pantai Cermin 2. Pematang Tengah 3. Kuala Serapuh 4. Pematang Serai 5. Pakubuan 6. Pematang Cengal	13 5 6 5 5 10	75 25 30 25 25 60
	<b>Jumlah</b>		<b>71</b>	<b>385</b>

Kelompok petani kecil yang dibentuk berdasarkan prinsip domisili dimaksudkan atau diasumsikan memiliki sosial ekonomi yang sama, saling mengenal, sehingga diharapkan dengan mudah melakukan kerja sama dalam sebuah organisasi ekonomi / kelompok usaha. Untuk

daerah Kabupaten Langkat jumlah kelompok yang terbentuk di Kecamatan Hinai adalah 27 kelompok yang terdiri dari 6 desa, antara lain di Desa Muka paya (5 kelompok), Desa Paya Renggas (2 kelompok), Desa Pasar VIII (3 kelompok), Desa Kebun Lada (5 kelompok), Desa Suka Damai (5 kelompok), Desa Cempa (7 kelompok). Di Kecamatan Tanjung Pura jumlah kelompok yang terbentuk adalah 44 kelompok yang terdiri dari 6 desa, antara lain di Desa Pantai Cermin (13 kelompok), Desa Pematang Serai (5 kelompok), Desa Pakubuan (5 kelompok), dan Desa Pematang Cengal (10 kelompok).

Sejak dibentuk atau ditumbuhkan dan dibina secara kontinu oleh Pembina, sampai saat ini keberadaan kelompok binaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kelompok aktif /kurang aktif. Kelompok aktif yaitu kelompok yang mulai ditumbuhkan sampai sekarang masih melakukan kegiatan dan ikatan dengan Pembina lapangan. Sedangkan kelompok yang tidak aktif/pasif adalah kelompok yang dalam melaksanakan kegiatan kelompok sudah tidak lagi melakukan bersama-sama kegiatan kelompok dan tidak ada pembinaan.

Di Kabupaten Deli Serdang jumlah kelompok petani kecil yang terdapat di Kecamatan galang semuanya aktif dalam melakukan

8 desa, antara lain Desa Sumber Rejo (4 kelompok), Desa Purwodadi (8 kelompok), Desa Suka Mandi Hilir (4 kelompok), Desa Pagar Merbau II (3 kelompok), Desa Suka Mulia (5 kelompok), Desa Tanjung Mulia (4 kelompok), Desa Tanjung Garbus II (5 kelompok) dan Desa Tanjung Garbus Kampung (3 kelompok).

**Tabel. 1b. Lokasi Pembinaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa (Kabupaten Langkat).**

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelompok	Jumlah Anggota
Langkat	1. Hinai	1. Muka Paya 2. Paya Renggas 3. Pasar VIII 4. Kebun Lada 5. Suka Damai 6. Cempa	5 2 3 5 5 7	25 10 15 25 25 45
	2. Tanjung Pura	1. Pantai Cermin 2. Pematang Tengah 3. Kuala Serapuh 4. Pematang Serai 5. Pakubuan 6. Pematang Cengal	13 5 6 5 5 10	75 25 30 25 25 60
<b>Jumlah</b>			<b>71</b>	<b>385</b>

Kelompok petani kecil yang dibentuk berdasarkan prinsip domisili dimaksudkan atau diasumsikan memiliki sosial ekonomi yang sama, saling mengenal, sehingga diharapkan dengan mudah melakukan kerja sama dalam sebuah organisasi ekonomi / kelompok usaha. Untuk

kegiatan, sedangkan di Kecamatan Pagar Merbau ada beberapa kelompok yang aktif dalam melaksanakan kegiatan kelompok, hal ini disebabkan oleh keterlambatan bantuan kredit/modal sehingga petani mengurungkan niatnya untuk bergabung.

Di Kabupaten Langkat, untuk Kecamatan Hinai dan Tanjung Pura semua kelompok petani kecil aktif di dalam melaksanakan kegiatan kelompoknya. Hal ini disebabkan semua kelompok tersebut selalu mendapat pembinaan dari petugas dan lancarnya bantuan modal usaha sampingan. (Tabel 2a dan 2b).

**Tabel 2.a. Keaktifan Kelompok untuk Kabupaten Deli Serdang**

Lokasi Kecamatan/Desa	Jumlah Kelompok	Aktif	Pasif
<b>I. Galang</b>	61	61	0
1. Jahrum A	12	12	0
2. Jaharum B	11	11	0
3. Kotasan	7	7	0
4. Pertangguhan	11	11	0
5. Paku	4	4	0
6. Kotangan	9	9	0
7. Paya Kuda	8	8	0
<b>II. Pagar Merbau</b>	36	28	0
1. Sumber Rejo	4	4	0
2. Purwodadi	8	5	3
3. Suka Mandi Hilir	4	3	1
4. Pagar Merbau II	3	3	0

5. Suka Mulia	5	4	1
6. Tanjung Mulia	4	4	0
7. Tanjung Garbus	5	3	2
8. Tanjung Garbus	3	2	1
Kampung			

**Tabel 2.b. Keaktifan Kelompok untuk Kabupaten Langkat**

Lokasi Kecamatan/Desa	Jumlah Kelompok	Aktif	Pasif
I. Hinai	27	27	0
1. Muka Paya	5	5	0
2. Paya Renggas	2	2	0
3. Pasar VIII	3	3	0
4. Kebun Lada	5	5	0
5. Suka Damai	5	5	0
6. Cempa	7	7	0
II. Tanjung Pura	44	44	0
1. Pantai Cermin	13	13	0
2. Pematang Tengah	5	5	0
3. Kuala Serapuh	6	6	0
4. Pematang Serai	5	5	0
5. Pakubuan	5	5	0
6. Pematang Cengal	10	10	0

Usaha kelompok petani di pedesaan masih berorientasi di bidang pertanian, baik sebagai usaha budidaya, usaha bidang industri dengan mengenakan bahan baku pertanian dan usaha jasa sebagai penunjang kegiatan pertanian dan masyarakat pedesaan pada umumnya. Usaha-usaha tersebut dilakukan di sekitar pedesaan dan dari aspek ekonomi dapat membantu perputaran ekonomi pedesaan yang pada umumnya

hasil atau nilai tambahnya dapat dinikmati oleh penduduk dipedesaaan.

Dari gambaran jenis-jenis usaha sebagian besar menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar pedesaan, sedangkan usaha-usaha yang menggunakan bahan dari luar pedesaan adalah jenis-jenis usaha seperti mie-sop, pakaian bekas, makanan ringan yang terbuat dari tepung roti, tempe-tahu yang dibuat dari kedele, dan lain-lain. Dari 89 kelompok yang aktif di Kabupaten Deli Serdang dan 71 kelompok yang aktif di Kabupaten Langkat dapat dikelompokkan masing-masing 3 jenis usaha sampingan, yang terdiri dari usaha budidaya, usaha industri pertanian, dan usaha jasa. Kabupaten Deli Serdang terdapat 9 kelompok jenis usaha budidaya antara lain 3 kelompok di Kecamatan Galang dan 6 kelompok di Kecamatan Pagar Merbau, 34 kelompok jenis usaha industri rumah tangga antara lain 24 kelompok kelompok di Kecamatan Galang dan 10 kelompok di Kecamatan Pagar Merbau, dan 46 kelompok usaha jasa antara lain 34 kelompok di Kecamatan Galang dan 12 kelompok di Kecamatan Pagar Merbau (Tabel 3a). Sedangkan di Kabupaten Langkat terdapat 20 kelompok jenis usaha budidaya antara lain 11 kelompok di Kecamatan Tanjung Pura dan 9 kelompok di Kecamatan Hinai, 35 kelompok jenis usaha industri rumah tangga antara lain 18 kelompok di Kecamatan Tanjung Pura dan 17 kelompok di Kecamatan Hinai, dan 16 jenis kelompok usaha jasa

antara lain 15 kelompok di Kecamatan Tanjung Pura dan 1 kelompok di Kecamatan Hinai (Tabel 3b).

**Tabel 3.a. Jenis Usaha Bersama Kelompok Petani Kecil Kabupaten Deli Serdang.**

Kecamatan	Usaha Budidaya	Jml Kel	Usaha Industri RT	Jml Kel	Usaha Jasa	Jml Kel
1. Galang	Peternak itik	1	Keripik ubi	3	Pengumpul sayur	4
	Peternak ayam	1	Keripik pisang	3	Pengumpul buah	3
	Peternak domba	1	Rempeyek	3	Pengumpul telur	1
			Atap rumbia	8	Jual keliling	1
			Bumbu kemasan	2	Jual pakaian	2
			Pakaian	1	Kedai sampah	4
			Opak ubi	2	Kelontong	2
			Ikan	1	Ikan segar	6
			Jamu gendong	1	Mie sop	3
					Warung kopi	2
<b>JUMLAH</b>				<b>24</b>	Es campur	1
2. Pagar Merbau	Peternak itik	3	Aneka kue	4	Aneka jajanan	5
	Peternak domba	3	Batu-bata	3	<b>Mie sop</b>	4
			Rempeyek	1	Minyak (keliling)	1
			Arang	2	Kedai sampah	2
					Lontong sayur	1
<b>JUMLAH</b>				<b>10</b>	Warung kopi	2
					Jual keliling	2
						<b>12</b>

**Table 3.b Jenis Usaha Bersama Kelompok Petani Kecil Kabupaten Langkat.**

kecamatan	Usaha Budiidaya	Jml Kel	Usaha Industri RT	Jml Kel	Usaha Jasa	Jml Kel
1. Tanjung Pura	Peternak itik	4	Tempe	3	Pengumpul pisang	3
	Peternak ayam	4	Aneka kue	2	Pengumpul sayur	3
	Sayur-sayuran	3	Jamu gendong	3	Pengumpul kelapa	3
			Miesop	2	Jual kerang	2
			Emping	3	Jualkepiting	2
			Sabun	2	Kedai sampah	2
			Atap rumbia	3		
<b>JUMLAH</b>				<b>11</b>		<b>18</b>
						<b>15</b>

2. Hinai	Peternak domba Peternak ayam Peternak itik	3 3 3	Keranjang jeruk Emping Jamu gendong Tempe Gula merah Batu bata Aneka kue Tempe	2 2 2 2 2 2 2 3	Kelontong	1
JUMLAH		9		17		1



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

1. Petani kecil yang merupakan sasaran program P4K adalah petani yang masih berada di bawah garis kemiskinan yaitu berpenghasilan setara dengan 320 kg beras per kapita per tahun .
2. Untuk Provinsi Sumatera Utara, lokasi kegiatan yaitu berada di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang dan Kecamatan Pagar Merbau. Kabupaten Langkat dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Hinai., yang terbesar di dua puluh tujuh desa.
3. Program pengentasan kemiskinan dapat dijalankan apabila keluarga berpenghasilan rendah ikut secara aktif melaksanakan kegiatan pembinaan. Dengan demikian masalah-masalah petani dapat dikenali dan dibantu untuk dipecahkan bersama dengan penyuluhan dan petugas terkait.
4. Sampai sekarang ini sudah ditumbuhkan atau dibentuk 169 kelompok petani kecil dan 161 kelompok telah mendapatkan bantuan modal usaha yang digunakan dalam berbagai jenis

kegiatan usaha bersama. Kelembagaan kelompok yang terbentuk dapat difungsikan dan dikembangkan tidak hanya sebagai kelompok usaha, juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

5. Bantuan kredit bagi petani kecil mempunyai peranan yang signifikan dalam memperlancar pembinaan kelompok, bantuan kredit yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh kelompok untuk meningkatkan kemampuan keuangan kelompok, sehingga kelompok dapat menumbuhkan dan menjalankan usaha-usaha sampingan untuk memperoleh tambahan pendapatan bagi keluarganya.
6. Penyuluhan pertanian mempunyai tanggung jawab untuk memperlancar penyaluran kredit dan pengembaliannya, sehingga tidak ada kelompok yang menunggak karena tidak terealisasi kreditnya. Penyuluhan membimbing kelompok dengan menggunakan metode pendampingan dan pemecahan masalah. Kegiatan-kegiatan penumbuhan atau pembentukan kelompok merupakan penerapan metode pembelajaran penyuluhan. Penyuluhan dapat mengambi manfaat dari kegiatan penyuluhan tersebut untuk dijadikan lahan pengembangan

prestasi dalam meningkatkan karirnya menjadi penyuluhan melalui pengumpulan angka kredit untuk kenaikan pangkat.

7. Bantuan kredit yang diberikan kepada petani dirasakan kurang memadai besarnya sebagai modal kerja kelompok, tidak mencukupi untuk kegiatan usaha anggotanya yang berjumlah rata-rata 5 orang tersebut karena kemampuan menabung anggota masih relative kecil.

## 6.2. Saran

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan dana bantuan khusus untuk program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan bantuan yang sudah disalurkan melalui BRI yang ditunjuk untuk melayani petani kecil dengan aturan dan ketentuan yang khusus dan benar-benar ada keberpihakan pada petani.
2. Program pembinaan kelompok petani kecil yang secara nyata dapat meningkatkan kemampuan berusaha bagi petani dan dapat memberikan penghasilan, maka sebaiknya sistem ini digunakan oleh pemerintah daerah melalui dinas pertanian kabupaten untuk dijadikan salah satu program pengentasan

kemiskinan dengan sasaran masyarakat tani di pedesaan dan diperluas lagi kepada desa yang belum mendapatkannya.

3. Dengan bertambahnya jumlah angka kemiskinan, program pembinaan kelompok ini sangat strategis digunakan, melalui sistem pembinaan kelompok ini memang terasa lambat hasilnya, tetapi perubahan 'perilaku petani ini mempunyai keuntungan dalam jangka waktu panjang.
4. Rendahnya kemampuan petani dalam memperoleh pendapatan dan kemampuan menabung yang hasilnya tidak cukup untuk meningkatkan pemupukan modal, maka bantuan kredit sebagai modal kerja kelompok perlu dipertimbangkan jumlahnya untuk ditingkatkan, jangka waktu pengembalian diperpanjang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Damanik, K, 2002. Manajemen Produksi Lanjutan, Bahan Kuliah dan Diskusi Manajemen Produksi, MM, USU. USU Press, Medan.
- Ginanjar, 1993. Strategi Pembangunan Nasional dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Gramedia, Jakarta.
- Gunardi, H. S., E. Suhendar, F. Rustiani, dan H. Yogaswara. 1994. Kredit Untuk Rakyat : Dar Mekanisme Arisan Hingga BPR. Akatiga, Bandung
- Hermanto, 1992. Perkembangan Perkreditan Pertanian Indonesia. Litbang Pertanian, Jakarta.
- Mardalis, 1995. Metode penelitian : Suatu Pendekatan Porposal. Bumi Aksara, Jakarta
- Rasyid, A., 2002. Materi Pemberdayaan KPK. Departemen Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K), Jakarta
- Sangun, E., Indratmo, S. Astuti, 2005. Dinamika Dan Kerjasama Gabungan KPK. Departemen Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Jakarta
- Saragih, B., 2001. Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Edisi kedua. Pustaka Wirausaha Muda, Bogor.

Saragih, B., 2001. Suara Dari Bogor : Membangun Sistem Agribisnis.

Pustaka Wirausaha Muda, Jakarta

Saragih dan Krisnamurthi, 1992. Pengembangan Agribisnis dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Kecil. Pustaka Wirausaha Muda, Salatiga.

Sayogjo, 1980. Pembangunan Pertanian Pedesaan. IPB Press, Bogor.

Soim, A, 2007. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Untuk Desa-Desa Miskin, Sinar Tani, Jakarta.

Sukartawi, 1996. Pengembangan Pertanian, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta.

Suwandi, 2004. Penumbuhan dan Penguatan Kapasitas Gabungan KPK. Departemen Pertanian, badan Pengembangan SDM Pertanian, Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K), Jakarta

Waluyo dan Djauhari, 1992. Kendala Penyaluran Kredit Usaha Tani. Litbang Pertanian, Jakarta.

Zachri, Z., 2002. Metodologi Penumbuhan dan Pembinaan KPK )Pola P4K). Departemen Pertanian, Jakarta.

## Lampiran 1

### KEBERADAAN KPK YANG TERBENTUK DAN PENYALURAN MODAL TAHUN 2006 KABUPATEN DELI SERDANG

No.	Kecamatan	Desa	KPK	Jlh. Anggota	Jumlah Modal
1.	Galang	7	61	244	Rp. 86.700.000
2.	Pagar Merbau	8	36	144	Rp. 35.000.000
	<b>Jumlah</b>	15	97	388	Rp. 121.700.000



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang